



Jogja Bakal Jadi Kota Pedestrian

Tim Gratis Bernas

Keberhasilan menata kawasan Malioboro menjadi tempat yang nyaman dengan jalur pedestriannya, bakal dijadikan model untuk penataan kawasan lainnya di kota Yogyakarta. Kelak, Yogyakarta bakal menjadi kota pedestrian yang nyaman, tidak hanya bagi warganya, namun juga bagi wisatawan. Tentu saja, mewujudkan impian menjadikan Yogyakarta sebagai kota pedestrian bukan pekerjaan mudah. Perlu pula dipikirkan nasib para Pedagang Kaki Lima (PKL) serta para juru pakir yang bakal terkena dampak langsung upaya penataan untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota pedestrian tersebut.

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Purwadi, mengakui butuh narasi panjang untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota pedestrian. Menurut Heroe Purwadi, pedestrian akan membuat tata ruang kota akan lebih tertata dan lebih hidup. Sebab, pedestrian memberikan hak bagi pejalan kaki, memberikan hak publik untuk ruang dialog, untuk penghijauan maupun untuk ruang ekspresi bagi para seniman.

Menurut Heroe Purwadi, apa yang telah dikerjakan di kawasan Malioboro saat ini baru sebatas semi pedestrian, belum pedestrian murni. "Semi pedestrian, belum pedestrian murni. Sebab kalau pedestrian murni malah belum tentu bisa dijalankan mengingat masih ke kawasan-kawasan strategis lainnya di Kota Jogja. "Semua penggal-penggal jalan akan dikembangkan konsep pedestrian," ujarnya.

Menurut Heroe, rencana penataan kawasan pedestrian di semua penggal jalan strategis di Kota Jogja telah mempertimbangkan banyak hal. Termasuk dampak sosial ekonomi bagi para PKL maupun juru parkir yang selama ini menempati trotoar di penggal-penggal jalan kawasan strategis tersebut. Pemkot, menurutnya telah mengumpulkan semua pihak yang terkait dengan kebijakan pedestrian, termasuk dari perwakilan PKL.

"Kami sudah ajak bicara pihak paguyuban PKL Yogyakarta. Intinya sebagian besar mereka setuju dengan rencana pengembangan Kota Jogja itu. Mereka menyadari (nantinya) akan berkurangnya space tempat PKL, namun mereka siap mendukung dan menyesuaikan," kata Heroe.

Mantan Direktur Akindo Yogyakarta itu mengatakan perihal rencana penyediaan lahan relokasi bagi para PKL. Saat ini Pemkot terus mencari solusi. Beberapa titik sudah ditemukan untuk tempat relokasi. "Belum bisa saya sampaikan sekarang karena ini berkaitan dengan faktor sosial. Ada beberapa titik yang disediakan untuk keperluan itu



malasnya budaya jalan kaki," kata Heroe kepada Harian Bernas, Jumat (6/10).

Heroe menambahkan, rencana mewujudkan kawasan pedestrian tidak berhenti di kawasan Malioboro. Pedestrian juga akan terus dikembangkan

k Lan
ditang
dikete

(relokasi),
katanya.

Heroe menegaskan Pemkot tidak akan mengabaikan keberadaan para PKL yang selama ini mencari nafkah di penggal-penggal jalan strategis. "Percayalah, kita ingin menata kota ini untuk

Malioboro terdiri dari Jalan Sosrowijayan, Jalan Dagen, Jalan Pajeksan, Jalan Beskalan di sisi barat, Jalan Perwakilan, Jalan Suryatmajan, Jalan Ketandan dan Jalan Pabringan di sisi timur.

Namun, meskipun



kehidupan bersama, untuk urip, urup, urus. Kita bisa hidup kalau kita peduli dengan orang lain juga, peduli dengan lingkungan kita," ujarnya.

Sirip Malioboro

Setelah penataan kawasan Malioboro dianggap tuntas, rencana berikutnya adalah menata kawasan penopang di sekitar Malioboro. Sirip-sirip Jalan Malioboro bakal menjadi target berikutnya, untuk mewujudkan konsep semi pedestrian di wilayah yang masuk jalur sumbu filosofis tersebut.

Menurut Walikota Jogja, Haryadi Suyuti, penataan sirip

sudah ada gambaran kawasan berikutnya yang bakal ditata, Pemkot Jogja belum menetapkan waktu pelaksanaannya. "Kita masih perlu koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. Semakin cepat semakin baik," kata Haryadi.

Namun, Haryadi Suyuti menegaskan bahwa Pemkot tetap akan mengakomodasi keberadaan PKL yang terdampak akibat penataan sirip-sirip Jalan Malioboro tersebut. "Sambil jalan kita persiapkan tempat yang lebih layak dan nyaman bagi para PKL," tegasnya.

Mewujudkan kawasan pedestrian, menurut Haryadi,

dipasang oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta.

adalah keharusan demi mengembangkan Kota Jogja yang lebih tertata dan ramah bagi pejalan kaki. Bahkan beberapa sarana pelayanan akan disediakan di titik-titik kawasan pedestrian tersebut. Ada empat titik instalasi keran air siap minum yang sudah

Keempat titik tersebut berada di depan Pasar Tanaman dan Satwa Yogyakarta (PASTY) Jalan Bantul Mantrijeron, dua titik di kawasan Jalan Malioboro, dan depan kantor PDAM Tirtamarta di Jalan RW Monginsidi Jetis. Anggaran pemasangan berkisar lebih dari Rp150

► ke hal 7

Jogja Bakal Jadi Kota Pedestrian

Sambungan hal 1

juta

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Wirawan Hario Yudho, mengatakan penataan sirip-sirip Malioboro bakal diselarasakan dengan konsep Penda DIY. Terutama menyangkut pengalihan arus lalu lintas dan keberadaan juru parkir.

Dia meminta semua elemen bersinergi dalam penataan Malioboro. Pasalnya, saat ini merebak parkir liar dadakan sejak relokasi parkir sisi timur Malioboro ke Tempat? Khusus Parkir Abu Bakar Ali.

"Juru parkir liar ini tidak memiliki surat tugas. Maka penertiban setidaknya harus dilakukan oleh tiga instansi, yakni Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta kepolisian," ujarnya.

Penataan sirip-sirip Malioboro tersebut tak lepas dari perintah Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. Menurut Sultan, kondisi kawasan sirip-sirip Malioboro saat ini terkesan kumuh. Berbanding terbalik dengan jalan Malioboro yang secara bertahap telah ditata rapi. Menurut Raja Keraton Jogja itu, pembenahan juga untuk menyambut berfungsinya New Yogyakarta International Airport (NYIA) pada 2019. Diprediksi bakal terjadi lonjakan kunjungan wisatawan ke Jogja, baik wisatawan domestik maupun manca negara.

Sultan mengakui, untuk mewudkan kawasan pedestrian tidak lepas dari keberadaan PKL yang harus tetap diakomodasi. "Pedestrian sesuatu hal yang penting bagi masyarakat, tapi pedagang tetap harus bisa berjualan. Kegiatan PKL itu bisa menjadi kekuatan ekonomi golongan menengah ke bawah," kata Sultan.

sampai saat ini tidak ada perkembangan berarti. Di satu sisi proyek pembangunan areal bekas penertiban PKL di jalan Sarkem terus berjalan," terang Yogi Zil Fadi, kuasa hukum PKL.

Menurut Yogi, ada indikasi maladministrasi PT KAI Daop 6 dalam pengurusan pedagang tersebut. Ini berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok PT KAI dalam surat peringatan kepada pedagang. Indikasi maladministrasi yang dimaksud adalah penggunaan beberapa dasar hukum KAI untuk menertibkan pedagang di Jalan Pasar Kembang yang dicantumkan dalam surat peringatan. Ada dasar surat kekancingan terkait hak kelola lahan Sultan Ground dari Keraton Yogyakarta ke PT KAI Daop VI. Tapi juga mengutip dasar surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penertiban aset milik negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu dinilai tidak konsisten dan kontradiktif.

Para pedagang juga memiliki Kartu Bukti Pedagang (KBP) dan membayar retribusi kepada Pemkot Jogja. Selain itu, keberadaan Pasar Kembang juga diakui sebagai pasar kelas IV dalam Perwal 33/2015 tentang pasar.

"Fungsi pengawasan pedagang itu wilayahnya di pemerintah daerah. Pedestrian itu fungsi publik kewenangan negara. Sedangkan PT KAI penyelenggara usaha BUMN, tapi kenapa melakukan penertiban pedagang," papar Yogi.

Protes para PKL terhadap penertiban berdalih untuk pedestrian juga berlanjut saat rencana penataan kawasan pedestrian di sisi barat Jalan Abu Bakar Ali, Kotabaru. Ketua Tim Advokasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan

akan memperpanjang izin," katanya

Sesuai rencana awal, sebanyak 18 PKL yang berada di sisi barat jalan Abu Bakar Ali bakal ditertibkan pada 30 September lalu. Namun akhirnya pemerintah menunda pelaksanaan penertiban.

"Kita tunda. Saat ini kita masih fokus kegiatan Wayang Jogja Night Carnival (puncak HUT Kota Jogja) yang akan digelar 7 Oktober besok," kata Camat Gondokusuman, Jalaluddin.

Menurutnya setelah tanggal 7 Oktober nanti, kecamatan selaku pihak yang berwenang mengeluarkan izin PKL bakal mengundang pedagang untuk berunding. Salah satu opsi yang akan ditawarkan adalah relokasi bagi PKL yang mayoritas berjualan helm tersebut.

"Ada pilihan tempat relokasi, seperti di Jalan Nyoman Oka. Tapi teknisnya nanti kita bicarakan setelah ada kesepakatan dengan pedagang," setelah Oktober, katanya.

Jalaludin mengungkapkan, aktivitas seluruh PKL di sepanjang Jalan Abu Bakar Ali tidak mengantongi izin sejak tahun 2014 lalu. Pihaknya tidak memperpanjang izin dengan alasan akan ada aturan baru pemerintah kota yang melarang kawasan trotoar di Jalan Abu Bakar Ali dimanfaatkan untuk berdagang PKL. Selain untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki, aturan itu diklaim mampu menekan kemacetan lalu lintas di Jalan Abu Bakar Ali.

Namun demikian, rencana penertiban kali ini baru menasar 18 PKL di sisi barat gereja Kotabaru. Sedangkan PKL di sisi timur gereja belum akan disentuh. "Nanti itu (ditertibkan) secara



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005